

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, .
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moerad, Pontang, 2012. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2012. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah., Andi, 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurispeudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2006. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bahder, Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitan Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1998. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Cetakan ke II*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1985. *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta.
- Kuffal, H.M.A, 2002. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum Cetakan Kedua*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus, M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadisoepipto, Hartono, 1996, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, LNRI Tahun 1981 Nomor 79, TLNRI Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LNRI Tahun 2009 Nomor 4379, TLNRI Tahun 2009 Nomor 5076;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pidana, LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LNRI Tahun 2009 Nomor 123, TLNRI Tahun 2009 Nomor 5043.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

YURISPRUDENSI

Putusan No. 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst.

Putusan No. 414/PID/2010/PT.DKI.

Putusan No. 599 K/Pid.Sus/2011.

Putusan No. 47 PK/PID.SUS/2012.

INTERNET

www.tribunnews.com

www.merdeka.com

www.beritahukum.com

www.rimanews.com

www.suarapembaruan.com

www.pkspiyungan.com